



Dr H Haedar Nashir, MSi

MENJALANKAN FUNGSI KEUMATAN DAN KEBANGSAAN

Sebagian warga masih ada yang bertanya. Seberapa jauh peran Muhammadiyah dalam menghadapi kasus penistaan agama dan aksi bela Islam yang menjadi peristiwa nasional yang berskala luas?

Sebenarnya jika mengikuti pemberitaan maupun pernyataan-pernyataan Pimpinan Pusat dan para anggota pimpinannya melalui media massa termasuk media milik Muhammadiyah pertanyaan seperti itu tidak perlu muncul. Boleh jadi informasi dan pemahaman sebagian warga dan elite di lingkungan Persyarikatan berbeda satu sama lain.

Pertanyaan tersebut mudah-mudahan tidak mengandung tuntutan agar Muhammadiyah sama seperti organisasi lain yang orientasi gerakannya melakukan aksi lapangan yang dikenal berhaluan keras. Pertanyaan tersebut juga tidak dimaksudkan agar Muhammadiyah melakukan peran yang masuk ke ranah aksi politik. Manakala itu yang dimaksudkan tentu saja Muhammadiyah tidak dapat melakukannya karena bukan watak gerakannya.

Peran Muhammadiyah

Sejak awal kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang menimbulkan reaksi keras umat Islam yang meluas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan langkah-langkah proaktif sesuai kadarnya selaku organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang selama ini memiliki Khittah dan Kepribadian yang menjadi bingkai pergerakannya. Sejumlah langkah terbuka dan tertutup dilakukan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, menentukan sikap dan pandangan bahwa apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu sebagai bentuk penistaan agama dan meminta penegak hukum untuk memprosesnya dengan tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Selanjutnya meminta semua pihak, termasuk di kalangan angkatan muda, mengawal proses hukum dengan baik agar tidak mengalami pembelokan.

Akhirnya kasus tersebut dibawa ke ranah hukum dimulai dari status tersangka hingga terdakwa. Di pengadilan proses hukum tersebut harus terus dikawal hingga vonis yang setimpal dan tidak mengalami pembelokan atau peringanan.

Kedua, melakukan berbagai langkah komunikasi dan lobi. Pimpinan Pusat berkomunikasi secara proaktif dan intensif dengan para tokoh dan organisasi Islam, tokoh dan organisasi keagamaan lain, tokoh dan organisasi komponen bangsa lainnya, serta tokoh-tokoh maupun institusi pemerintahan. Secara khusus dengan Presiden dan Wapres hingga ketua-ketua partai politik maupun lembaga kenegaraan lainnya, termasuk dengan Kapolri. Dengan komunikasi tersebut kami bertukar pandangan, saling memberi masukan, dan mencari titik temu solusi yang dihadapi. Kami menyampaikan saran kritis dan tegas, yang tidak mungkin detail proses itu diinformasikan secara terbuka.

Ketiga, melakukan dukungan moral Aksi Bela Islam. Muhammadiyah sejak awal mengetahui bahwa umat Islam tersinggung dan kita pun menyampaikan sikap yang sama atas ujaran yang menodai atau menista agama Islam itu. Ketika reaksi umat meluas dan hendak melakukan aksi lanjutan pada 2 Desember 2016 aparat akan menindak dan pihak luar banyak yang menolak dengan anggapan merusak persatuan dan kebhinnekaan. Muhammadiyah bersama MUI dan NU yang diundang Presiden meyakinkan kepada pemerintah dan aparat keamanan bahwa aksi bela Islam itu demokratis yang akan berlangsung damai dan hal itu hak politik umat yang agama dan perasaan keagamaannya tercederai.

Akhirnya, aksi umat Islam tersebut dibolehkan dan dipusatkan di Tugu Monas Jakarta yang berlangsung masif dan damai, serta melahirkan gelombang massa Muslim yang terbesar dalam sejarah Republik ini. Kalau

PP Muhammadiyah menyampaikan agar tidak membawa atribut organisasi hal itu karena aksi tersebut merupakan aksi seluruh komponen umat Islam dan yang lain pun diminta tidak mengibarkan simbol sendiri-sendiri. Atributnya yang dilarang dibawa, orangnya tidak dilarang, bahkan dinyatakan sebagai hak politik setiap warga negara.

Keempat, menjalin poros negosiasi ke luar. Muhammadiyah mengkomunikasikan kepada pemerintah dan berbagai pihak luar tentang problem keberadaan, posisi, dan peran umat Islam sebagai mayoritas secara terbuka, objektif, dan memberikan tekanan kuat untuk diartikulasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah bahkan secara terbuka menyatakan "Umat Islam yang mayoritas ini ibarat orang yang tubuhnya besar tetapi memiliki baju kesempitan hingga robek."

Perjuangan mendesak dan menguatkan peran umat Islam dengan aspirasinya yang penting dan mendasar akan terus kami lakukan untuk mencapai titik keseimbangan yang optimal. Perjuangan tersebut tentu dengan tetap berada dalam konstelasi dan konteks menjaga kebhinnekaan dan keutuhan bangsa sebagaimana bingkai "Negara Pancasila Darul Ahdi Wasy-syahadah" yang telah menjadi rujukan amanat Muktamar ke-47 di Makassar.

Kelima, mendorong pengawalan proses hukum. Pimpinan Pusat Muhammadiyah selalu mengingatkan semua pihak agar mengawal proses hukum kasus penistaan agama itu secara saksama. Muhammadiyah memberi mandat kepada Prof Yunahar Ilyas mewakili Muhammadiyah sebagai saksi ahli. Tugas yang satu ini belum selesai sampai vonis tiba dan itu merupakan proses yang tidak mudah, yang segala kemungkinan bisa terjadi. Seperti ketika saudara Basuki Tjahaya Purnama telah mengalami tekanan publik yang luar biasa melalui aksi bela Islam, ternyata dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama meraih suara terbesar. Apa artinya? Gerakan massa umat Islam yang masif belum tentu berbanding lurus dengan fungsi politik real di lapangan.

Peran Parpol

Muhammadiyah sesuai Khittah dan Kepribadiannya dalam menghadapi masalah bangsa betapapun beratnya senantiasa mengedepankan dialog, komunikasi, lobi, dan langkah-langkah lainnya yang dipandang tepat dan efektif, serta tetap menempuh cara-cara konstitusional. PP Muhammadiyah juga tegas dalam hal yang memang menyangkut masalah mendasar, sehingga tidak pernah *plin-plan* apalagi mengorbankan prinsip. Kami selalu menjaga *marwah* dan prinsip Peryarikatan, karena kami

tahu dan paham tentang dasar-dasar pergerakan Muhammadiyah dan kondisi yang berkembang.

Muhammadiyah melangkah bukan karena selera tokoh atau orang perorang, tetapi atas dasar prinsip-prinsip gerakan. Muhammadiyah sungguh memahami perkembangan yang terjadi serta berusaha melakukan langkah-langkah dan solusi yang tepat dan bermartabat, yang tidak melampaui peran dan tugas Muhammadiyah sebagai Ormas.

Adapun hal-hal yang merupakan ranah perjuangan politik praktis atau bertemali dengan isu atau langkah yang cenderung berpolitik-praktis tentu harus didorong agar parpol-parpol di negeri ini menjalankan fungsinya. Dalam kasus penistaan agama dan aksi bela Islam kita bertanya sejauhmana peran partai-partai Islam bersama tokoh dan para aktivisnya? Ini masalah keadilan dan hukum, bukan soal primordial.

Partai politik jangan berpangku tangan dan seolah lepas tanggungjawab, mereka harus memberi kontribusi. Jangan sampai ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terus didorong dan dituntut untuk berperan, sementara partai politik Islam atau lainnya dibiarkan bebas tanggungjawab. Kalau Ormas berkomunikasi secara wajar dengan pemerintah atau pihak lain lalu dianggap masalah, sementara partai politik Islam yang semula di luar kemudian masuk koalisi dianggap baik dan tidak dimasalahkan.

Muhammadiyah tentu terlalu berlebih-beban manakala dituntut bergerak sendiri, lebih-lebih melampaui takaran dirinya selaku organisasi kemasyarakatan yang bukan organisasi politik. Semua ada tempat untuk posisi dan perannya masing-masing. Para tokoh Islam maupun elite bangsa diharapkan peranannya di tempat masing-masing dengan belajar saling berdialog dan bersinergi secara demokratis, elegan, dan bermartabat. Satu sama lain tidak perlu merasa paling berjasa, paling lurus, paling berani, dan paling menjadi penjaga kebenaran yang diiringi sikap saling menegasikan.

Muhammadiyah tetap istiqamah di jalan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai Khittah dan Kepribadiannya. *Alhamdulillah*, kepercayaan banyak pihak, termasuk dari para tokoh aksi bela Islam terhadap langkah-langkah PP Muhammadiyah cukup positif. Mereka menghargai Muhammadiyah. Perjuangan memang masih panjang, terjal, dan bukan tanpa masalah yang harus dihadapi bersama secara dewasa dengan kerjasama yang semakin solid. Muhammadiyah sendiri memiliki garis dan irama sendiri, tidak harus sama dengan pihak lain dalam melakukan peran keumatan dan kebangsaan di negeri ini •